ANALISIS PENGARUH FLYPAPER EFFECT TERHADAP EFISIENSI BELANJA DAERAH DI PROVINSI GORONTALO

Lukfiah Irwan Radjak¹, Syarif K. Latarang²

1. 2., Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

Email; lukfiahradjak@umgo.ac.id, Syarifklatarang@gmail.com

Info Artikel: Diterima: 22 November 2021, Disetujui: 24 Desember 2021, Publish 24 Desember 2021

Abstract:

The research was conducted in Gorontalo Provincial government. The purpose of this research was to find out how the Flypaper Effect affects the efficiency of regional spending in Gorontalo Province. This study uses the Multiple Regression Method where the dependent variable is Regional Expenditure and the independent variable is the General Allocation Fund and Regional Original Income. From the results of research conducted partially the General Allocation Fund has a positive effect on regional spending and Regional Original Income does not have a positive effect on Regional Expenditures. Meanwhile, the General Allocation Fund and Regional Original Revenue have a positive effect on regional expenditures simultaneously. And during the 2016-2020 research period, the Flypaper Effect phenomenon occurred in Gorontalo Province. Meanwhile, the efficiency ratio of Regional Expenditures to Regional Income from 2016-2020 shows inefficient results.

Keywords: *Flypaper Effect , Regional Expenditure*

Abstrak:

Penelitian dilakukan di pemerintah Provinsi Gorontalo. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Flypaper Effect Terhadap Efisiensi Belanja Daerah di Provinsi Gorontalo. Penelitian ini Menggunakan Metode Regresi Berganda dimana variabel terikat adalah Belanja Daerah dan variabel bebas adalah Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah. Dari hasil penelitian yang dilakukan secara parsial Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh Positif terhadap Belanja Daerah. Sedangkan secara simultan Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli daerah berpengaruh Positif terhadap Belanja daerah. Serta selama periode penelitian tahun 2016-2020 terjadi fenomena Flypaper Effect pada Provinsi Gorontalo Sedangkan Rasio efisiensi Belanja Daerah terhadap pendapatan daerah dari tahun 2016-2020 menunjukan hasil yang kurang efisien.

Kata kunci : Flypaper Effect, Belanja Daerah

PENDAHULUAN

Pembentukan Undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimaksud

untuk mendukung pendanaan atau penyerahan urusan kepada pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah

daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip *money follows function* yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintah yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintah.

Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah mencakup pembagian keuangan antara pemerintah daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan dan penugasan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai daerah otonom, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. (Darise, 2009)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam lainnya. Selain dari dana perimbangan tersebut, pemerintah

daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan lain-lain yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah.

Daerah yang kemampuan fiskal rendah akan mendapatkan DAU dalam jumlah yang relatif besar, sebaliknya daerah yang mempunyai kemampuan fiskal tinggi akan mendapatkan DAU dalam jumlah yang relatif kecil. Hal ini diharapkan agar kemandirian daerah menjadi semakin tinggi seiring dengan meningkatkan kapasitas fiskal daerah, yang menyebabkan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan DAU bisa lebih dikurangi agar tidak terjadi permasalahan di suatu pemerintah (Halim, dalam Susansi dan Indriani, 2017)

Dana transfer dari pemerintah pusat diharapkan secara efektif dan efisien digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula secara transparan dan akuntabel. Berdasarkan desentralisasi maka pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan. Khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerah tersebut melalui PAD.

Di temukan fenomena *flypaper effect* mengidentifikasi bahwa pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan publik

senantiasa cenderung lebih merespon atas pengeluaran belanja daerah dari transfer “berhemat” dalam optimalisasi pengeluaran yang berasal dari PAD. *Flypaper effect* juga bisa mempengaruhi kecenderungan belanja pemda pada periode selanjutnya, sehingga efek tersebut akan berdampak jangka panjang. (Iman Santoso dalam Transana dan Racmaeny, 2017).

Flypaper effect merupakan suatu fenomena yang merujuk kepada pengaruh dari transfer dana dan pendapatan daerah terhadap kebijakan belanja daerah. Ketika penerimaan berasal dari transfer, maka stimulasi belanja yang ditimbulkan akan berbeda dengan stimulasi yang timbul dari pendapatan daerah, terutama pajak daerah. Ketika respon belanja daerah lebih besar terhadap transfer dibandingkan dengan respon belanja daerah terhadap pendapatan daerah. Fenomena *flypaper effect* membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja daerah yang lebih besar dibandingkan penerimaan transfer tersebut. (Kuncoro dalam Eni, 2016).

Selain *Flypaper* Belanja daerah juga mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dan arah kebijakan pembangunan daerah (Mahmudi dalam Fathiyah, 2012) Belanja daerah sangat rentan akan terjadinya inefisiensi dan kebocoran, maka perencanaan pengendalian dan pengawasan terhadap belanja sangat penting untuk dilakukan. Belanja daerah

setelah dibelanjakan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran biasanya dianalisis untuk dijadikan dasar evaluasi, koreksi dan perbaikan ke depan.

Halim dalam Susanti dan Indrian, (2017), mengatakan permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah secara keseluruhan serta kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan lemah. Peran PAD dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antara daerah, yaitu kurang dari 10% hingga 50%.

Pada saat ini Rata-rata PAD setiap provinsi masih belum mampu membiayai kebutuhan daerah dan sering menggunakan dan transfer untuk belanja daerah sehingga terjadinya defisit anggaran. Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, defisit APBD merupakan selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah pada tahun anggaran yang sama. Defisit terjadi bila jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah belanja. Berdasarkan sumber data yang didapat dari DJPK Kemenkeu Laporan Realisasi APBD Provinsi Gorontalo tahun 2020, Pendapatan Rp. 8.478.681.556.712 dan Belanja Rp. 8.639.641.847.333 selisihnya mengalami sebesar (Rp.160.960.290.621), Hal ini menandakan bahwa pendapatan dari

Provinsi Gorontalo masih sangat kurang dibanding dengan belanja daerah yang cenderung sangat besar dan pemerintah belum mengoptimalkan PAD sebagai penyokong belanja pemerintah, Defisit anggaran yang terjadi karena tidak efisiensinya belanja daerah di Provinsi Gorontalo.

Tabel 1. Persentase Keuangan Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2020

Uraian	Persentase Rata-Rata
PAD	0,642 %
DAU	1,028 %
BD	53,924 %

Sumber : DJPK Kemenkeu. 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata persentase kenaikan DAU lebih besar daripada persentase kenaikan PAD, dalam hal ini dari besarnya nilai transfer dari pada nilai PAD menggambarkan kecenderungan menggunakan dana transfer untuk belanja daerah. Secara keseluruhan perkembangan keuangan daerah menunjukkan hubungan yang tidak simetris, dimana perubahan pertumbuhan DAU dengan belanja Daerah. Hal ini terlihat indikasi kuat perilaku belanja daerah sangat dipengaruhi sumber penerimaan berupa dana transfer yaitu DAU sehingga akan melemahkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan sendiri. Bisa dikatakan bahwa di Provinsi Gorontalo kurang mengoptimalkan sumber potensi-potensi yang baru atau yang sudah ada

dalam daerah guna untuk meningkatkan PAD.

Berdasarkan permasalahan di atas bahwa kemandirian daerah merupakan suatu tuntutan wajib mengingat dalam era globalisasi, setiap daerah harus mampu dan bisa bersaing dengan daerah lainnya, terutama dalam hal menggali sumber-sumber potensi yang baru atau pun yang sudah ada di daerah guna untuk meningkatkan PAD yang nantinya bisa digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Mengetahui bahwasannya kriteria yang digunakan untuk tingkat kemampuan daerah dalam mengelola rumah tangga sendiri dalam meningkatkan PAD berupa pajak dan retribusi daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk pemerataan pembangunan, meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. (Kusumah dalam Muhammad, 2015)

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh secara simultan DAU dan PAD terhadap belanja di Provinsi Gorontalo Tahun 2016-2020 Daerah, Untuk mengetahui secara Parsial Pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah di Provinsi Gorontalo Tahun 2016-2020 dan Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah di Provinsi Gorontalo Tahun 2016-2020, Untuk mengetahui analisis rasio efisiensi di Provinsi Gorontalo tahun 2016-2020.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif yang melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui Analisis pengaruh *flypaper effect* terhadap efisiensi belanja Daerah di provinsi gorontalo.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda adalah analisis untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen, dan untuk memprediksi atau meramalkan suatu nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen (Priyatno, 2014). Dalam penelitian ini, persamaan regresi linier yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

Keterangan :

Y = Belanja Daerah

a = Konstanta Regresi

β_1, β_2 = Koefisien Regresi

X_1 = Dana Alokasi Umum

X_2 = Pendapatan Asli Daerah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo yaitu pada tahun 2016-2020. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah

variabel bebas (X_1) Dana Alokasi Umum, (X_2) Pendapatan Asli Daerah, dan variabel terikat (Y) Belanja Daerah.

1. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah di Provinsi Gorontalo tahun 2016-2020

Indikasi kuat perilaku belanja daerah sangat dipengaruhi oleh sumber penerimaan berupa dana transfer yaitu DAU sehingga akan melemahkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan sendiri. Jika DAU mendominasi aspek pemasukan daerah sendiri hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan masih tinggi untuk membiayai belanja daerah. peneliti menguji pengaruh jumlah DAU terhadap BD dengan menggunakan Uji T untuk mengukur tingkat signifikansi, maka perlu membandingkan antara T_{hitung} dengan T_{tabel} . *Degree of Freedom* (Df) dapat ditemukan dengan menggunakan rumus $N - K - 1$, N dalam penelitian ini adalah jumlah sampel penelitian, K merupakan jumlah variabel bebas jika disubstitusikan maka akan menjadi $20 - 2 - 1 = 17$ Df atau sebesar 1,739 sedangkan T_{hitung} bernilai 29,494 yang dapat disimpulkan bahwa jumlah T_{hitung} lebih besar dari T_{tabel} artinya DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. ini sejalan dengan analisis regresi linier berganda bahwa peningkatan DAU sebanyak 1%, akan mempengaruhi kenaikan pembiayaan belanja daerah menggunakan DAU sebanyak 2.612%. Hasil penelitian ini sesuai

dengan penelitian yang dilakukan oleh sarita (2019) yang menyatakan DAU memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap belanja daerah yang artinya Semakin besar DAU yang diterima menunjukkan bahwa ketergantungan penggunaan dana transfer untuk membiayai belanja daerah. Ini berarti bahwa pemerintah provinsi Gorontalo belum mandiri dalam memenuhi kebutuhan *financial* dalam menjalankan roda pemerintahan yang mengakibatkan tujuan dari desain-tralisasi fiskal untuk menciptakan pemerintahan dalam aspek belanja daerah belum bisa tercapai.

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Gorontalo tahun 2016-2020.

PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi kinerja perekonomian suatu daerah. Setiap daerah harus mampu dan bisa bersaing dengan daerah lainnya, terutama dalam hal menggali sumber-sumber potensi yang baru atau pun yang sudah ada di daerah guna untuk meningkatkan PAD yang nantinya bisa digunakan untuk membiayai pembangunan daerah tanpa bergantung pada pendapatan dana transfer, Mengetahui bahwasannya kriteria yang digunakan untuk tingkat kemampuan daerah dalam mengelola rumah tangga sendiri untuk meningkatkan PAD berupa pajak dan retribusi daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah

dan pembangunan daerah, untuk pemerataan pembangunan, meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. (Kusumah dalam Muhammad, 2015). Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pengaruh PAD yang berpengaruh terhadap belanja daerah dengan menguji secara parsial menunjukkan bahwa PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja daerah. *Degree of Freedom* (DF) dihitung menggunakan rumus $N - K - 1$, N dalam penelitian ini adalah jumlah sampel data, K merupakan Variabel Bebas jika disubstitusikan maka akan menjadi $20 - 2 - 1 = 17$ df sebesar 1,739 sedangkan $T_{hitung} = 21,339$. Ini berarti T_{hitung} lebih kecil dari T_{tabel} atau PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja daerah. Ini sejalan dengan hasil analisis melalui regresi linier berganda yang diinterpretasikan sebagai koefisien regresi setiap peningkatan PAD sebanyak 1% akan mempengaruhi turunya belanja daerah yang menggunakan dana transfer sebanyak -2.890%. jika PAD meningkat maka akan mengurangi jumlah dana transfer untuk membiayai daerah dan terhindar dari fenomena *flypapper effect*. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Aisyah dkk (2016) bahwa berpengaruh signifikan dan negatif terhadap belanja daerah. Tentunya dengan meningkatkan PAD yang tinggi daerah dapat lebih memaksimalkan lagi untuk meningkatkan sumber-sumber keuangan daerahnya untuk digali lagi dan tidak ketergantungan terhadap

dana perimbangan untuk membiayai daerah.

3. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Gorontalo tahun 2016-2020.

Daerah diharapkan mampu mengalokasikan sumber dana ini pada sektor-sektor produktif sehingga dapat mendorong peningkatan investasi di daerah yang kemudian berdampak terhadap meningkatnya sumber penerimaan PAD. PAD yang seharusnya menjadi ciri dari kemandirian daerah, namun banyak daerah yang masih memiliki ketergantungan yang besar pada dana transfer. Proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang relatif tinggi dibandingkan dengan penerimaan PAD. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai pengaruh DAU, PAD terhadap Belanja Daerah yang diuji secara simultan, Pengujian secara simultan dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh bersama variabel bebas terhadap variabel terikat dan hasil menunjukkan bahwa DAU dan PAD secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, Hasil ini ditunjukkan oleh nilai F_{hitung} yakni 472,471 mempunyai nilai lebih besar dari nilai F_{tabel} yakni 3.74, artinya Variabel tersebut memiliki peran yang cukup andil dalam belanja daerah dilihat dari hasil regresi koefisien yang signifikan terhadap belanja daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Wiwin dkk (2016) Hasil uji hipotesis variable DAU dan PAD Hasil regresi diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 165,7230 lebih besar dari nilai F_{tabel} pada $\alpha = 1\%$ sebesar 99,50 artinya bahwa, secara bersama-sama variabel DAU dan PAD memiliki pengaruh terhadap belanja daerah.

4. Penentuan Flypaper Effect

Untuk menentukan terjadi atau tidaknya *flypaper effect* maka peneliti menggunakan pendekatan *flypaper effect* yakni menurut Tresch (2002) untuk melihat apakah terjadi *flypaper effect*, dapat dilihat dari perbandingan antara koefisien DAU dan koefisien PAD, Jika koefisien DAU > Koefisien PAD maka terjadi *flypaper effect*. Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti koefisien DAU sebesar 2.612 dan Koefisien PAD -2.890 artinya koefisien DAU lebih besar dibanding dengan PAD, maka peneliti menyimpulkan bahwa telah terjadi fenomena *flypaper effect* pada pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2016-2020. Hal ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Haris dan Nayang (2020) dengan hasil pada tahun 2018 Provinsi Gorontalo merupakan salah satu Provinsi yang mengalami terjadinya fenomena *fly-paper effect* yang bersumber dari besar jumlah DAU yang diterima oleh pemerintah Provinsi Gorontalo untuk membiayai daerah dibanding dengan pendapatan daerah.

5. Efisiensi *Belanja Daerah*

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang provinsi atau kabupa-ten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penangannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaks-anakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-und-angan.

Belanja penyelenggaraan uru-san wajib diprioritaskan untuk me-lindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Jika pemerintah membiayai semua itu menggunakan pendapatan asli daerah maka akan efisien bagi kemandirian pemerintah karena tidak bergantung pada pendapatan dana transfer yang diberikan pemerintah pusat, untuk mengukur efisiensi belanja daerah maka menggunakan rasio efisiensi.

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pen-dapatan yang diterima. Rasio efisiensi menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengefisiensikan biaya yang dikeluarkan oleh pem-erintah. penilaian efisiensi dikatakan sangat efisien apabila hasil perhitungan dibawah 60%. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya, (Mardiasmo dalam Vera dkk, 2014)

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel. 2 Rasio Efisiensi Belanja Daerah Provinsi Gorontalo

Tahun	Rasio Efisiensi
2016	100,73%
2017	98,03%
2018	101,55%
2019	99,92%
2020	96,88%

Sumber : Hasil Olah Data, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat Berdasarkan analisis tingkat rasio efisiensi belanja daerah terhadap pendapatan daerah ditahun 2016-2020, pengelolaan keuangan daerah Provinsi Gorontalo dapat dikategorikan kurang efisien pada tahun 2016 rasio efisien 100,76% dengan kriteria kurang efisien dan pada tahun 2017 menurun menjadi 98,03% dengan kriteria kurang efisien dan pada tahun 2018 dengan rasio efisien 101,55% meningkat 1% dari tahun 2016 dan meningkat 3% dari tahun 2017 dengan kriteria kurang efisien dan pada tahun 2019 menurun 2% dari tahun 2018 dengan rasio efisien 99,92% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan 3% dari tahun 2019 dengan rasio efisien 96,88%. Kemudian pada tahun 2016 dan 2018 terjadi defisit anggaran yaitu selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah pada tahun anggaran yang sama, defisit tersebut dapat mempengaruhi Laporan perubahan saldo anggaran lebih (LP-SAL).

KESIMPULAN

1. Hasil penelitian dengan menggunakan aplikasi SPSS melalui uji koefisien regresi linier berganda menunjukkan bahwa setiap peningkatan Dana Alokasi Umum sebanyak 1%, akan mempengaruhi kenaikan pembiayaan belanja daerah menggunakan DAU sebanyak 2.612%. Dari uji secara parsial menunjukkan bahwa DAU berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja daerah.
2. Hasil penelitian dengan menggunakan aplikasi SPSS melalui uji koefisien regresi linier berganda menunjukkan bahwa setiap peningkatan PAD sebanyak 1% akan mempengaruhi turunya belanja daerah yang menggunakan dana transfer sebanyak -2,890%. Dari uji secara parsial menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan dan negatif terhadap belanja daerah.
3. Hasil olah data menggunakan SPSS melalui uji simultan menunjukkan bahwa DAU dan PAD sama-sama berpengaruh terhadap belanja daerah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran penelitian ini sebagai berikut :

1. Pemerintah provinsi perlu mengoptimalkan sumber-sumber PAD untuk meningkatkan pendapatan daerah sendiri, serta dapat menekan besarnya dana

transfer untuk membiayai daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi Gorontalo agar terhindar dari fenomena flypaper effect

2. Pemerintah Provinsi Gorontalo juga dapat menggali potensi-potensi daerah yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, untuk dapat menciptakan keuangan daerah yang mandiri sesuai dengan tujuan otonomi daerah.
3. Dengan adanya perhitungan analisis Rasio efisien pendapatan dan belanja daerah yang telah dianalisis oleh peneliti, diharapkan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo dapat lebih melaksanakan anggaran secara efisien serta mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dengan cara memaksimalkan PAD.
4. Kepada peneliti selanjutnya agar bisa menambahkan variabel bebas lainnya seperti Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil yang secara teori dapat mempengaruhi belanja daerah yang dapat menimbulkan fenomena Flypaper effect.

Referensi

- Darise, (2009). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi 2, Jakarta Barat: PT. Indeks Permata Putri Median
- Eni, (2016). *Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kab-upaten/Kota Di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2008-2014*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. (<https://respository.usd.ac.id>) diakses pada 10 maret 2021
- Haris, Nayang. (2020). *Analisis flypaper effect pada DAU, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan pendapatan asli*

- daerah terhadap belanja daerah Provinsi di Indonesia. JEA: Jurnal Eksplorasi Akuntansi . Vol. 2 No 3, Seri c 3144-3159
- Nabilah, A. N., Soelistyo, A., & Kusuma, H. (2016). Analisis Flypaper Effect PAD dan DAU Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2014. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 14(2), 190-203.
- Mohammad, (2015). Analisis Kemam-puan Keuangan Daerah Dan Flypaper Effect Dalam Pelak-sanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Kabupaten jepara Tahun 2001-2013). Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponegoro.(<https://eprints.undip.ac.id>) diakses pada tanggal 5 maret 2021
- Susanti dan Indriani, (2017). Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan DAU (DAU) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Periode 2012-2016: Jurnal Akuntansi Dewantara
- Sarita, (2019). Flypaper Effect Pada DAU, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Sumatera Utara.
- Transna, rachmaeny, (2017). Analisis Flypaper Effect Pengelolaan Keuangan Daerah di kota Jayapura.JMB: Jurnal manaje-men & bisnis . pp 9-21
- Vera dkk, (2014). Analisis efisiensi dan efektivitas serta kemandirian pengelolaan keuangan daerah di kabupaten minahasa utara. Jurnal mahasiswa Unsrat
- Wiwin, Paulus. (2016). Flypaper Effect pada DAU (DAU) dan Pendapatan asli daerah (PAD) serta pengaruhnya terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Sulawesi tengah.

Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang kewenangan pemerintah daerah